## 64 Nama Lolos ke Tahap **Wawancara Seleksi Jabatan KPK**

JAKARTA (IM) - KPK menggelar seleksi untuk men- dapat kategori dalam tahagisi 11 jabatan pada jabatan pan seleksi. Pertama, peserta pimpinan tinggi (JPT) Madya dan Pratama

Kini, ada 64 calon yang lolos ke tahap wawancara.

Ke-64 calon ini awalnya telah melewati tahap uji kompetensi manajerial dan sosial kultural. Seluruhnya dinyatakan bisa lanjut ke tahap berikutnya, yakni pemaparan makalah dan wawancara.

"Jadi seluruh peserta sebanyak 64 peserta, kan ada 10 jabatan masing-masing enam dan satu jabatan isinya empat jadi totalnya ada 64. Jadi seluruh 64 peserta ini mengikuti lah dan wawancara bakal dites tahapan berikutnya," kata Ketua Tim Pansel Dwi Wahyu Atmaji di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (11/4).

Dwi mengatakan termemenuhi syarat (MS); kedua, peserta masih memenuhi syarat (MMS); dan terakhir, peserta kurang memenuhi syarat (KMS).

mereka yang MS itu adalah nilainya lebih besar atau sama dengan 80 persen, kemudian masih memenuhi syarat itu rentang nilainya 68 sampai di bawah 80 atau sampai 79 koma sekian. Ketiga, kurang memenuhi syarat itu bila lebih kecil dari 68 persen," katanya.

"Dengan rentang nilai

Tahap pemaparan makalaksanakan pada 13-19 April 2022 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Hasil lengkap bisa diakses di situs KPK. mei

## **KPK Panggil Dirut Telkomsel Terkait Kasus Bupati PPU Abdul Gafur**

JAKARTA (IM) - Komi- PPU Durajat. si Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama (Dirut) PT Telkomsel, Hendri Mulya Syam, terkait kasus yang menjerat Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur

Hendri bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU, Kalimantan Bendahara DPC Partai De-Timur, tahun 2021-2022.

"Hendri Mulya Syam atau yang mewakilinya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AGM (Abdul Gafur Mas'ud)," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Selasa

Selain itu, KPK juga akan memeriksa Direktur Utama PT Protelindo, Ferdinandus Aming Santoso; Direktur Kaltim Naga 99, Setho Bimadji; karyawan PT Prima Surya Silica, A Yora; PNS Kabupaten PPU Herry Nurdiansyah; dan ASN Kabupaten

Abdul Gafur sebelumnya diamankan dalam kegiatan tangkap tangan di yang dilakukan KPK Jakarta dan Kalimantan Timur pada 12 Januari 2022. Seusai operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengumumkan enam orang jadi tersangka terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU.

KPK juga menetapkan mokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis, Plt Sekretaris Daerah PPU Mulyad, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU Edi Hasmoro sebagai tersangka. Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU Jusman, serta pihak swasta bernama Achmad Zudi juga ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat itu mengatakan, tim KPK mengamankan uang Rp 1,4 miliar dari penangkapan Abdul Gafur di lobi mal kawasan Jakarta Selatan. • mei



### PENYALURAN DANA BANSOS SUBSIDI MINYAK GORENG DI DUMAI

Petugas mengambil foto tanda bukti penerima dana bantuan sosial (bansos) subsidi minyak goreng di Kantor Pos Dumai, Riau, Selasa (12/4). Pemerintah mulai menyalurkan dana bansos subsidi minyak goreng untuk tiga bulan ke depan sebesar Rp300 ribu kepada 13.045 kepala keluarga di Dumai bersamaan penyaluran dana bantuan bahan pokok tahap lima senilai Rp200 ribu untuk bulan Mei 2022.

## **Jokowi Lantik Anggota KPU** dan Bawaslu Periode 2022-2027

orang anggota komisi pemilihan umum (KPU) dan lima orang anggota badan pen-2022 - 2027 dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), di

Istana Negara, Selasa (12/4). Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.33P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota KPU dilakukan pelantikan ini. Dan Keputusan Presiden (Keppres) No.34B tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Bawaslu

Mereka yang dilantik menjadi anggota KPU yakni Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Sedangkan anggota Bawaslu terpilih yakni Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

"Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah janji, sebagai anggota KPU dan sebagai anggota Bawaslu, terlebih saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara

JAKARTA (IM) - Tujuh untuk mengucapkan sumpah janji menurut agama masingmasing?," tanya Jokowi.

"Bersedia," jawab para gawas pemilu masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu seretak.

> "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota komisi pemilihan umum, sebagai anggota badan pengawas pemilu dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Per-

Tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepercayaan negeri kesatuan republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan," demikian kutipan pengambilan sumpah yang dibacakan Presiden Jokowi yang diikuti anggota KPU dan Bawaslu terpilih. • mei

wakilan Rakyat Daerah

# 2 Polhukam



#### DPR SAHKAN RUU TPKS MENJADI UU

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga (kedua kiri) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kanan) disaksikan Wakil Ketua DPR Rahmad Gobel (kiri) dan Lodewijk F Paulus kedua kanan) saat Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4). Dalam rapat paripurna tersebut DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.

DPR SAHKAN UU TPKS

# Paksa Korban Pemerkosaan Kawin dengan Pelaku Bisa Dipenjara 9 Tahun

UU TPKS mengatur ketentuan mengenai jerat pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan, termasuk di dalamnya pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku pemerkosaan.

JAKARTA (IM) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam pembicaraan Tingkat II di rapat paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa (12/4).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, proses pengesahan tersebut dimulai dari Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya yang juga sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS menyampaikan laporan pembahasan RUU TPKS antara

ti Kupang 1999-2009, Ibra-

him Agustinus Medah (74)

dijatuhi hukuman 6 tahun

penjara oleh majelis hakim

Pengadilan Negeri (PN) Ku-

pang. Ibrahim terbukti men-

galihkan aset negara berupa

tanah dan bangunan eks

Gedung Radio Pemerintah

Daerah (RPD) Kabupaten

6 tahun penjara," demikian

siaran pers PN Kupang yang

diterima wartawan, Selasa

membayar denda Rp 500 juta,

pengganti kerugian negara

Rp 8 miliar dengan keten-

tuan satu bulan setelah pu-

tusan inkrah, Terdakwa tidak

bersedia membayar, harta

bendanya akan disita. Jika

tidak mencukupi dipidana

penjara selama 2 tahun,"

ketua majelis Derman P.

Nababan dengan anggota

Putusan itu ketok oleh

ujarnya.

subsidair 6 bulan kurungan.

"Menjatuhkan hukuman

Selain pidana penjara,

"Serta membayar uang

Agustinus Medah dihukum atas aset Pemkab Kupang

Kupang.

DPR, pemerintah dan koalisi masyarakat peduli perempuan.

Setelah Willy Aditya selesai membacakan sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian menanyakan ke seluruh anggota DPR RI apakah setuju dengan pengesahan RUU TPKS menjadi UU.

"Apakah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi undangundang?" tanya Puan kepada peserta sidang.

"Setuju," jawab para peser-

Sontak sejumlah elemen kelompok koalisi peduli

Eks Bupati Kupang Divonis 6 Tahun Penjara

Lizbeth Adelina (Hakim

Ad Hac. Majelis juga me-

nyatakan satu bidang tanah

seluas 1.358 meter persegi,

SHM No.1608 an. Ibra-

him Agustinus Medah yang

telah beralih ke Sakai Joha-

nis Sonny, beserta sebuah

bangunan di atasnya seluas

210 meter persegi terletak

di Jalan Ahmad Yani, Kel.

Oeba, Kec. Kota Lama,

Kota Kupang, dikembalikan

bila kasus bermula saat Tim

KPK melakukan suvervisi

bulan Februari 2021 lalu.

Saat dilakukan uji petik,

ditemukan tanah aset Pemda

dalam Sertifikat Hak Pakai

(SHP) No. 5 di Jalan Ahmad

Yani, Kota Lama, Kota Ku-

pang dikuasai oleh Yohanes

nyidikan oleh Kejaksaan

Tinggi Kupang, ternyata

aset yang dulunya digunakan

sebagai gedung RPD terse-

but dijual Agustinus Medah

dengan harga Rp 8 miliar,"

"Setelah dilakukan pe-

Di persidangan terbukti

kepada Pemkab Kupang.

Terbukti Korupsi Lahan Pemda,

perempuan yang duduk di balkon ruang rapat paripurna gedung Nusantara II DPR Senayan Jakarta bersorak dan bertepuk tangan.

Setelah itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga memberikan sambutannya terkait proses pembuatan RUU TPKS yang membutuhkan proses panjang.

Tampak hadir pula Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) RI, Edward Omar Sharif Hiariej di ruang rapat paripurna.

Di dalam UU TPKS diatur ketentuan mengenai jerat pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan, termasuk di dalamnya pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku pemerkosaan. Pada Pasal 10 Ayat (1) UU TPKS dijelaskan, setiap

Setelah tidak menjabat

sebagai Bupati, pada 2016

silam saat Agustinus Medah

duduk di Senayan sebagai

Anggota Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) mewakili

Provinsi Nusa Tenggara

Timur (NTT) mengajukan

permohonan balik nama

ke kantor Pertanahanan.

Berbagai upaya dilakukan

sehingga terbitlah SHM

No 1608 atas namanya dan

menjualnya kepada Saksi

beratkan Terdakwa sebagai

Bupati Kabupaten Kupang

periode 1999-2004, peri-

ode 2004-2009 dan Ang-

gota Dewan Pertimbangan

Daerah (DPD) RI tahun

2014-2019 mewakili Provinsi

Nusa Tenggara Timur, mem-

berikan contoh yang tidak

baik dalam pengelolaan aset

negara kepada masyarakat.

Sedangkan keadaan yang me-

ringankan, Terdakwa sudah

berusia lanjut (74 tahun),"

beber majelis hakim saat

menyampaikan pertimban-

gannya. • mei

"Keadaan yang mem-

Yohanes Sonny.

orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan.

"Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta," begitu bunyi Pasal 10 Ayat (1) aturan

Adapun pada Pasal 10 Ayat (2) dirinci, termasuk pemaksaan perkawinan yakni perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan. Pemaksaan perkawinan merupakan satu dari sembilan jenis TPKS yang ketentuan pidananya diatur dalam UU TPKS.

Sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur di dalam Pasal 4 Ayat (1) UU TPKS. Sembilan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS yakni pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kotrasepsi, dan pemaksaan sterilisasi.

Selain itu juga pemak-

saan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain kesembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang disebut di dalam Pasal 4 Ayat (1), terdapat 10 jenis kekerasan seksual lain yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2), yakni perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentan-

gan dengan kehendak korban. Selain itu, ada pula pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk ekspolitasi seksual, serta kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Ada pula tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan. • han

# Anggaran Pemilu Rp76,6 Triliun, **KPU: Masih Mungkin Ditekan**

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp 76,7 triliun masih mungkin ditekan. Saat ini KPU sedang melakukan peninjauan dan penghitungan kembali kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemilu 2024.

"Anggaran yang sudah diajukan sekitar Rp 86 triliun, sudah direview lalu dirasionalisasi menjadi sekitar Rp 76,6 triliun. Ada kemungkinan nanti masih ketemu angka yang rasional, efisien dan efektif," ujar Hasyim dalam keterangan pers usai pelantikan anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 di Istana Negara, Selasa (12/4).

Menurutnya, pada tahun ini kegiatan besar KPU adalah pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024. Tahapan pendaftaran akan dimulai Agustus mendatang."Sehingga pada Desember akan kita ketahui partai politik peserta pemilu 2024," tutur Hasyim.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 diperkirakan mencapai Rp 110,4 triliun. Presiden meminta agar biaya tersebut dihitung ulang agar persiapannya dapat dilakukan secara bertahap.

"Pemilu pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan butuh anggaran sampai Rp110,4 triliun, untuk KPU Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun," ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi pada Senin (11/4). "Saya minta untuk dihitung

lagi lebih detail, baik APBN maupun APBD, agar dapat dipersiapkan secara bertahap,' tulis Kepala Negara. • han

## **DPR SAHKAN TIGA RUU WILAYAH PAPUA**

Suasana Rapat Paripurna dengan agenda pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4). Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR menetapkan tiga rancangan RUU terkait pemekaran wilayah Papua menjadi RUU inisiatif DPR yaitu RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, RUU Provinsi Pegunungan Tengah.

## **PENGUMUMAN**

-Dengan ini diumumkan, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 11 April 2022 Nomor 16, dihadapan Haji YUNARDI, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Selatan, semua Pemegang Saham PT. PUL PERKASA PILAR UTAMA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut "Perseroan", antara lain telah memutuskan :

-Demikianlah hal ini diumumkan, guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Bab VI Bagian Kelima Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, Tentang Cipta Kerja.

Jakarta, 12 April 2022 Direksi PT. PUL PERKASA PILAR UTAMA

PENGUMUMAN PENGALIHAN SEBAGIAN BESAR SAHAM & PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) Kedua PT BUMI MAS SEJAHTERA ("Perseroan")

uhi ketentuan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini kami: Pembali rencana Pengalihan atas saham milik GRM METALS AND MINERALS (SEA) PTE LTD embali rencana Pengailhan atas saham milik GRM METALS AND MINERALS (SEA) PTE LTC
unan KIRTIPAL SINGH RAHEJA.
nanggil kembali seluruh Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan untuk hadir dalam
kedua pada:
Kamis, 28 April 2022
10.00 WiB
Kantor Perseroan
JI. Kartini Raya No.7, RT. 012, RW. 05,
Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.

ık-pihak yang berkepentingan lainnya, dapat mengajukan keberatannya secara tertuli: isisi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah tangga

PT BUMI MAS SEJAHTERA